

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Diajukan Untuk Melengkapi Serta Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1) Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau



OLEH:

ANDI MARLINA
10675005141

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2010

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



OLEH:

ANDI MARLINA
10675005141

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2010

ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Abstrak
Oleh
ANDI MARLINA

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka setiap daerah mulai mengurus rumah tangganya sendiri. Baik penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Di daerah Kabupaten Indragiri Hilir ada 10(sepuluh) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini perumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah pengelolaan penerimaan pajak daerah di Indragiri Hilir.?. dengan tujuan untuk mengetahui sistem penerimaan, pengelolaan penerimaan serta pemungutan pajak daerah di Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sehingga mampu menjelaskan secara mendalam tentang pengelolaan penerimaan pajak daerah serta hambatan dan kebijakan yang akan di ambil dalam melakukan penerimaan pajak daerah secara maksimal. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian, di dapat bahwa pengelolaan penerimaan pajak daerah masih kurang maksimal dikarenakan realisasi penerimaan berdasarkan kepada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan menambahkan sekian persen. Mencantumkan subjek pajak dan objek pajak yang banyak padahal sebenarnya subjek pajak memiliki objek pajak yang lebih dari satu. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pendataan, penerimaan dan pembukuan pajak daerah. Kurangnya kesadaran oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimiliki.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah, Hambatan Pajak Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II TELAAH PUSTAKA.....	 9
2.1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2. Pajak Daerah.....	10
2.3. Tinjauan Pajak Dalam Islam	17
2.4. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah.....	18
2.5. Sistem Pemungutan Pajak	20
2.6. Administrasi Penerimaan Pajak Daerah	22
2.7. Prosedur Penetapan dan Pemungutan Tarif Pajak Daerah.....	26
2.8. Defenisi Konsep	26
2.9. Hipotesis	27
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 28
3.1. Waktu dan Tempat Penulisan.....	28
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Sumber Data	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Analisa Data	30

BAB	IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
		4.1. Tinjauan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	31
		4.2. Letak dan Luas Wilayah.....	32
		4.3. Fisiografi.....	33
		4.4. Kondisi Demografi	35
		4.4.1. Penduduk	35
		4.4.2. Sosial	37
		4.5. Mata Pencarian Penduduk	38
		4.6. Kondisi Perekonomian	40
		4.7. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir	42
		4.7.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah.....	42
		4.7.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah	43
		4.7.3. Gambaran Personil Dinas Pendapatan	46
		4.7.4. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan.....	49
		4.7.5. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah . .	50
		4.8. Pendapatan Asli Daerah	51
		4.9. Jenis Potensi Pajak Daerah Di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	52
 BAB	 V	 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 57
		5.1. Analisa Sistem Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Daerah.....	57
		5.1.1. Sistem Penerimaan Pajak Daerah.....	57
		5.1.1.1. Pendataan Dan Pendaftaran	58
		5.1.1.2. Pemungutan Pajak Daerah	59
		5.1.1.3. Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah	60
		5.1.1.4. Pembayaran Dan Penagihan	61
		5.1.2. Penetapan Tarif Pajak Daerah	62
		5.1.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	67
		5.1.4. Penyetoran Dan Pemungutan Pajak Daerah.....	68
		5.2. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam MeningkatkanPenerimaan Pajak Daerah.....	70
		5.3. Kebijakan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah	72
 BAB	 VI	 KESIMPULAN DAN SARAN	 74
		6.1. Kesimpulan.....	74
		6.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi dan dalam provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Untuk dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah, pemerintah tidak bisa sepenuhnya melakukan pelayanan kepada provinsi-provinsi. Sehingga setiap provinsi memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur urusannya sendiri dalam mengatur pemerintahan sehingga pelayanan yang efektif dan efisien akan terlaksana.

Dalam prakteknya, setiap daerah yang otonom hanya melaksanakan wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangga di daerah masing-masing sehingga asas Desentralisasi adalah landasan yang penting suatu daerah dapat dikatakan otonom. Karena daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setiap daerah. Hal ini sesuai dengan PP No.04 Tahun 2000 mengatakan bahwa “Daerah otonom selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara Republik Indonesia, kewenangan yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan kewenangan yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk menciptakan otonomi yang dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan rakyat maka harus meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah didasarkan kepada Undang-undang.

Sesuai dengan Undang-undang No.22 Thn 1999 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin di capai dengan pembentukan undang-undang ini menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-undang No.34 Thn 2000 yang menetapkan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut pendapat R.Dyatmoko pajak adalah kepada yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat prestasi kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum hubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Undang-undang No.33 Thn 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah menempati tempat pertama dari pendapatan asli daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rutin daerah dan membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kebutuhan pembayaran di daerah itu.

Untuk mencukupi pendapatan daerahnya maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya mamperluas dan menambah jumlah sumber keuangan mereka, salah satunya bentuknya adalah dengan cara pemungutan berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah. Dalam **UU No.28 Thn 2009** menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat di dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukam Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Disamping itu dari pemerintah daerah sendiri terutama di daerah Indragiri Hilir sendiri telah memasukkan beberapa Pajak Daerah untuk dapat diambil potensinya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, diantaranya:

1. Pajak Usaha Penyewaan Bangunan dengan **Perda No.63 Thn 2000**
2. Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Bududidaya Perikanan dengan **Perda No.15 Thn 2005**
3. Pajak Pendaftaran Perusahaan dengan **Perda No.11 Thn 2008**

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial. Juga dilihat dari jenis pajak yang dimiliki juga cukup banyak, sehingga tentu akan memberi daya dorong dalam pertumbuhan objek dan subjek pajak baru. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah agar setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari target dan realisasi di bawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Pajak Daerah.

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Prosentasi
1	2005	4.547.525.000,00	5.259.269.439,00	115,65
2	2006	5.087.671.350,00	4.694.395.417,00	92,27
3	2007	6.283.000.000,00	7.021.638.974,00	111,76
4	2008	7.067.000.000,00	6.530.560.008,00	88,05

5	2009	8.459.107.759,00	8.333.477,094,00	98,51
---	------	------------------	------------------	-------

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan dari tabel 1.1 dari target yang diharapkan dan sesuai dengan sumber-sumber yang ada yaitu jumlah keadaan dan obyek-obyek yang ada. Melihat realisasi penerimaan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat memenuhi target pada Tahun 2006, 2008 juga pada Tahun 2009. Namun pada Tahun 2005 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah dapat memenuhi target bahkan over target. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDRAGIRI HILIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas dan juga gejala-gejala dalam penelitian ini dimana harapan dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah akan memperberat pendapatan daerah. Pembagian akan berhasil, dan memenuhi target akan tercapai.

Maka dari uraian di atas maka penulis maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut **“BAGAIMANAKAH PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDRAGIRI HILIR”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui sistem penerimaan, pengelolaan penerimaan dan pemungutan pajak daerah di Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- c. Untuk mengetahui upaya oleh Dipenda Inhil dalam meningkatkan Penerimaan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Unit Pelaksana UPTD dalam rangka melakukan pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli daerah dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan informasi yang mungkin akan bermanfaat bagi kepentingan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- c. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang pajak daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang pengertian pengelolaan penerimaan pajak daerah dan tolak ukur penerimaan pajak daerah juga sistem pemungutannya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab IV Gambaran Umum

Bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum Kabupaten Indragiri Hiir dan sejarah singkat tentang Kantor Dinas Pendapatan

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana menurut konsep daerah otonom adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada setiap daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Salah satu diantaranya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan masalah pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya **Devas** (Dalam tesis Almasri 2002:19) mengemukakan beberapa hal :

1. Tujuan Pengelolaan Keuangan tujuan utama keuangan pemerintah daerah meliputi (1) *Tanggung jawab (accountability)*. Dimana pemerintah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. (2) *Mampu memenuhi kewajiban keuangan*. yaitu keuangan harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, yang pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang). (3) *kejujuran*, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan diperkecil. (4) *Hasil guna (effectiveness)* dan daya guna (efficiency). Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. (5) *Pengendalian*, Petugas Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas dapat tercapai.
2. Unsur utama pengelolaan keuangan dapat dibagi dalam dua kelompok.
(1) *Unsur berkala dan unsur hukum*. unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun. Sedangkan unsur hukum adalah mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala. (2) *unsur luar dan dalam*, unsur luar meliputi pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh

pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah.

3. Tolak ukur pengelolaan keuangan terdiri atas (1) *Sederhana*, yaitu sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh orang yang bertugas menjalankannya. (2) *lengkap*, secara keseluruhan pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan yang mencapai semua tujuan yang unsur-unsur utama pengelolaan keuangan. (3) *Berhasil guna*, pengelolaan keuangan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. (4) *Berdaya guna*, dalam hal ini terdapat dua segi. *pertama*, daya guna melekat yaitu pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya artinya hasil yang ditetapkan dapat dicapai dengan biaya yang sekecil-kecilnya. *Kedua*, pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya itu dan tidak menghambatnya. (5) *mudah disesuaikan*, pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikan pada keadaan yang berbeda-beda.

Selanjutnya dalam **UU No.25 Thn 1999** telah menerapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2.2. Pajak Daerah

Sebelum membahas tentang pengertian pajak daerah, ada baiknya terlebih dahulu perlu mengetahui definisi pajak secara umum sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibawah ini :

Menurut **Brotodihardjo** (dalam tesis Almasri 2002:20) pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut **Soemitro (2004:1)** pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum.

Sedangkan pada **UU No. 28 Thn 2009** pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini merupakan ubahan dari **UU No.34 Thn 2000** tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah khusus untuk daerah kota dan kabupaten menurut **UU No.28 Thn 2009** adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel;

Pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Sedangkan sebagai subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel selanjutnya yang dikatakan wajib pajak hotel dengan tarif pajak maksimum sebesar 10%.

2. Pajak Restoran;

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dimuka. Sedangkan sebagai subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran selanjutnya yang dikatakan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran dengan tarif pajak maksimum 10%.

3. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan. Sedangkan sebagai subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Selanjutnya yang dikatakan dengan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak maksimum 35%.

4. Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, maupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tarif pajak maksimum 25%.

5. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan sebagai subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian dikatakan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Tarif maksimum adalah 10%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
7. Pajak Parkir;
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
8. Pajak Air Tanah;
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
- c. untuk memperoleh keuntungan;
- d. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- e. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

11. Bea Perolehan Atas Tanah dan/atau Bangunan;

Bea Perolehan Atas Tanah adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Dalam **UU No.28 Thn 2009** dalam pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa ”Dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memungut pajak yang sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Indragiri, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet. Dengan melihat perkembangannya ada beberapa pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan potensi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

12. Pajak Usaha Penyewaan Bangunan;

Dengan **Perda No. 63 Thn 2000**. Pajak usaha penyewaan bangunan adalah pajak atas bangunan rumah tempat tinggal yang di sewakan lebih dari 3 (tiga) buah rumah. Objek pajak adalah bangunan yang dapat disewakan. Sedangkan subjek pajak adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha penyewaan.

13. Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan;

Dengan **Perda No. 15 Thn 2005**. Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan adalah pungutan daerah atas pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan seperti ikan/udang laut segar, ikan/udang air tawar, kepiting, kerang yang sejenis, ikan segar yang diasinkan (ikan asin), udang segar yang diolah (ebi dan terasi), reptilian (labi-labi, kura-kura, ular, biawak, buaya yang tidak dilindungi), ikan bandeng, udang windu, ikan patin ikan lele, ikan nila, ikan bawal air tawar dan ikan kakap, hasil

laut dan perairan lainnya, hasil budidaya tambak, kolam dan hasil budidaya lainnya. Objek pajak adalah setiap produksi atau penimbunan atau penjualan hasil laut dan budidaya perikanan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi atau mengumpulkan, menjual hasil laut dan budidaya perikanan. Tarif pajak pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil laut :
 - Ikan/udang laut segar.....1.5% dari harga.
 - Ikan/udang air tawar.....1,5% dari harga
 - Kepiting.....1% dari harga
 - Kerang sejenisnya.....1% dari harga
 - Ikan segar yang diasinkan (ikan asin).....1% dari harga
 - Ikan segar yang diolah (ikan Salai).....1% dari harga
 - Udang segar yang diolah (ebi).....1,5% dari harga
 - Udang segar yang diolah (terasi).....1% dari harga
 - Reptilia (labi-labi, kura-kura, ular, biawak dan buaya)
.....5% dari harga
 - Hasil laut dan perairan lainnya.....1% dari harga
 -
- b. Hasil budidaya perikanan
 - Ikan bandeng.....0,5% dari harga
 - Udang windu.....0,5% dari harga
 - Kepiting.....0,5% dari harga
 - Ikan patin.....0,5% dari harga
 - Ikan nila.....0,5% dari harga
 - Ikan lele.....0,5% dari harga
 - Ikan bawal air tawar.....0,5% dari harga
 - Ikan kakap.....0,5% dari harga
 - Hasil budidaya tambak, kolam dan budidaya lainnya
.....0,5% dari harga

14. Pajak Pendaftaran Perusahaan;

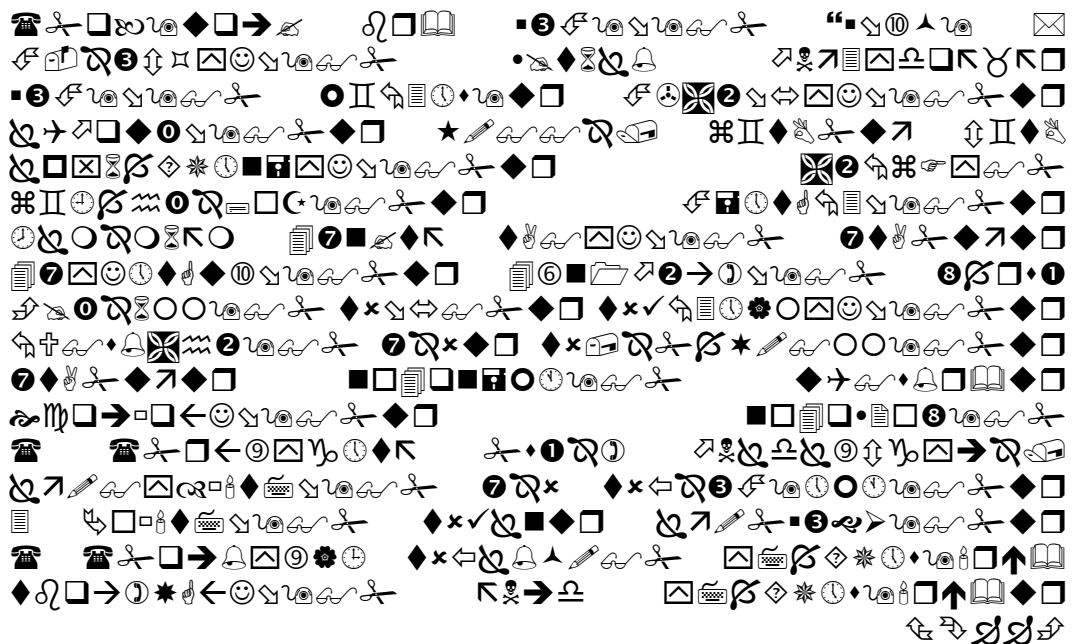
Dengan **Perda No.11 Thn 2008**. Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah pajak pendaftaran perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Besarnya tarif pajak maksimum atas pajak pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Terbatas (PT).....Rp. 500.000.-/Lima Tahun
2. Koperasi.....Rp. 50.000.-/Lima Tahun
3. CV.....Rp. 250.000.-/Lima Tahun
4. Firma / Usaha Dagang.....Rp. 250.000.-/Lima Tahun
5. Perseorangan.....RP. 100.000.-/Lima Tahun
6. Bentuk Perusahaan Lain.....Rp. 250.000.-/Lima Tahun
7. Swasta Asing/joint venture (PT).....Rp. 1.000.000.-/Lima Tahun

2.3 Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pada masa Rasulullah istilah pajak lebih dikenal dengan Zakat dan Jizyah .

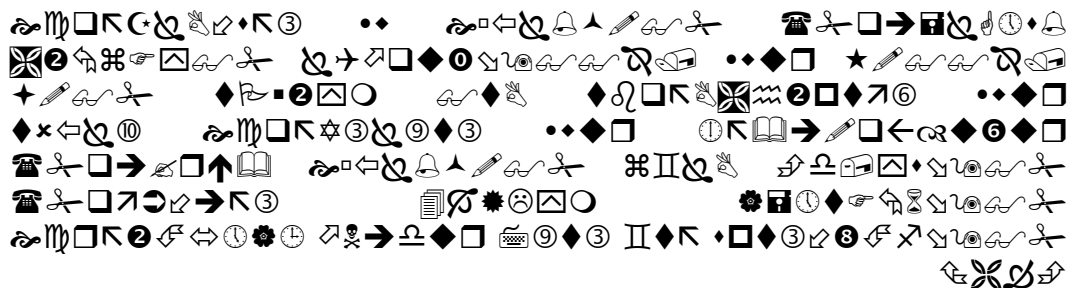
Zakat adalah zakat merupakan kewajiban seorang muslim sebagai pembersih harta seorang Muslim. Karena, di dalam harta yang dimiliki terdapat juga hak-hak orang lain. Sedangkan Jizyah disini adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan tentang zakat yang bunyi :



Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang menepati janjinya

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah : 177

.Dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 29 tentang jizyah yang berbunyi :



Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah:29).

Zakat dan jizyah sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu menyerahkan sesuatu. Namun yang membedakan adalah istilah yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW.

2.4. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau pajak

mutlak untuk dilakukan. Karena tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik dan tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

Menurut **Devas** (dalam buku Tjip Ismail 2007:44) ada lima tolak ukur untuk menilai berbagai pajak daerah sebagai berikut :

1. Hasil(*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan(*equity*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berada tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat-ketempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya guna ekonomi (*economy efficiency*) : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil”beban lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah(*suitability as a local revenue source*). Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Selanjutnya berhubungan dengan tolak ukur untuk menilai pajak daerah di atas **Musgrave** (dalam buku waluyo 2007:23) kemudian mengemukakan suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria antara lain ;

1. *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat dan dinikmatinya dari pemerintah.
2. *Ability Principle*, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Menurut **Mangkoesebroto** (2002:24) kriteria sistem pajak yang baik adalah :

1. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan “bagian yang wajar”.
2. Pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (*excessburden*) harus seminimal mungkin.
3. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienan yang terjadi disektor swasta, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
4. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
6. Kepastian dapat dilaksanakan.
7. Dapat diterima

2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga (3) macam prinsip pemungutan pajak yang berlaku

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya terhutang ada pada fiskus (fiskus aktif).

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self assessment system*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak daerah terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak yang aktif).
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).

Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan penerangan, pengawasan maupun sebagai verivikator.

Self assessment system dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. *Semi self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang pada awal tahun sebagai perhitungan sementara dan setelah periode (tahun tersebut berakhir), pajak yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

- b. *Fully assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak yang terutang baik pada awal tahun maupun pada akhir tahun pajak. Perhitungan pada awal tahun pajak merupakan perhitungan sementara dan pajak yang telah dibayarkan pada tahun berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap utang pajak yang sesungguhnya menurut perhitungan setelah tahun pajak tersebut berakhir. Dalam sistem ini fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, kecuali apabila wajib pajak atau wajib pungut menyalahi peraturan yang berlaku.

3. *With Holding System*.

With holding sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.6. Administrasi Penerimaan Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah, adalah memberikan pelayanan yang optimal sangat dibutuhkan mengingat administrasi penerimaan pajak daerah merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di pemerintahan tingkat lokal.

Berbagai cara dalam pengoptimalan sistem administrasi penerimaan pajak daerah, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi,

dan pemungutan; mengembangkan sistem valuasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.

Menurut **Achmad Luthfi** (2006:6) Pengadministrasian pajak daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas adminsitratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadminsitrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadminsitrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :

- a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan objek pajak daerah yang dapat disembunyikan. Hal lain yang juga menentukan keberhasilan proses identifikasi adalah kemampuan jajaran pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pembanding yang dapat dijadikan bahan untuk

melakukan konfirmasi silang untuk memastikan seseorang atau badan harus melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.

b. Melakukan penghitungan yang tepat.

Setelah dilakukannya proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan (*assessment*). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

c. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak daerah dan adalah melakukan pemungutan. Proses pemunutan pajak daerah dan diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak daerah dan retribusi daerah ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat.

- d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan.

Dalam rangka pemungutan ini, hendaknya pemerintah daerah mengenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar supaya pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil perolehan yang optimal. Untuk lebih memberi kenyamanan bagi para pembayar pajak Daerah, hendaknya pemerintah daerah juga memberikan kenyamanan yang maksimal bagi mereka dalam membayar, misalnya mempermudah proses pembayaran, memperhatikan kenyamanan kantor tempat dilakukannya pembayaran, dan lain sebagainya.

- e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak diadministrasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak daerah terjadi ketika seseorang atau badan yang seharusnya membayar pajak daerah memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari wajib pajak daerah yang bekerja sama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Dalam proses pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah tentunya tidak terhindarkan munculnya biaya. Biaya pengadministrasian ini biasanya diukur dalam proporsi jumlah penerimaan pendapatan yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang harus dikorbankan dalam proses pengadministrasian tersebut. Adalah penting untuk tetap menjaga agar proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang optimal.

2.7. Prosedur Penetapan dan Pemungutan Tarif Pajak Daerah

Menurut **Syahrudin** (1997:11) Dalam prosedur penetapan dan pemungutan tersebut mempunyai mekanisme kegiatan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan ini memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan daerah yang mengatur dan menentukan tarif pajak.
Dalam tahap ini adalah menentukan besaran tarif pajak daerah yang ditetapkan oleh Perda. Kemudian diusulkan kepada Pemerintah Pusat.
2. Melakukan penaksiran terhadap besarnya pajak daerah.
Dalam tahap kedua ini akan mengidentifikasi jumlah wajib pajak dan melakukan penaksiran jumlah omset dan pendapatan wajib pajak.
3. Melakukan perhitungan terhadap besarnya potensi pajak daerah.
Dalam tahapan ini akan menghitung berapa besarnya jumlah potensi pajak daerah dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Menetapkan target penerimaan pajak daerah.
Pada tahap ini adalah menetapkan target penerimaan pajak yang harus di capai pada periode tertentu dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.
5. Melakukan pungutan pajak daerah.
Pada tahap ini adalah melakukan pemungutan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Tingkat II.

2.8. Defenisi Konsep

- a. Sistem Pemungutan pajak daerah dengan tiga cara yaitu, dengan Official Assesment system, Self Assesment System dan With Holding System.
- b. Pengelolaan adalah bagai mana Dinas Pendapatan Daerah dapat mengelola pajak daerah mulai dari pendaftaran hingga sampai penetapan pajak daerah
- c. Pajak Daerah Merupakan sumber pendapatan yang ada di daerah baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketetapan dari daerah yang yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan yang berlaku.

2.9. Hipotesis

Merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan analisa atas literatur dan pemikiran sebelumnya, dapat diajukan sebagai berikut **“Diduga pengelolaan penerimaan pajak daerah di Indragiri Hilir kurang maksimal”**.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penulisan

Yang menjadi daerah penelitian adalah kabupaten/kota Tembilahan dengan alasan ditinjau dari aspek politis kota Tembilahan merupakan Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang juga menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perkembangan objek pajaknya setiap tahunnya selalu mengalami dinamika perubahan penerimaan yang berubah setiap tahunnya sehingga hal ini berpengaruh kepada jumlah penerimaan. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertempat di Jalan Hangtuah No.04 Tembilahan Kota. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2010.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih banyak menggunakan data sekunder sebagai bahan dalam bentuk dokumen untuk melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang dikutip dari berbagai sumber lain dan telah diolah oleh orang lain, Juga menyangkut dengan catatan historis atau data yang telah di publikasikan oleh pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini data sekunder lebih banyak digunakan, sehingga dibutuhkan data-data seperti :

1. Daftar peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2009

2. Juklak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Daftar target dan realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004-2008
4. Inhil dalam angka Tahun 2008
5. Data tugas dan fungsi Dinas Pendapatan daerah Tahun 2009

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengumpulan data langsung kelapangan melalui wawancara dengan beberapa orang responden terutama pejabat yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikutip dari berbagai sumber lain sehingga tidak bertindak otentik. Data tersebut biasanya berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya dokumenter dan arsip-arsip yang telah teruji keabsahannya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini dipergunakan metode pengumpulan data.

1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung pada lokasi penelitian tentang pengelolaan penerimaan pajak daerah.

2. Wawancara/interview

Yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Analisa Data

Analisis data adalah pengelolaan data sehingga siap dipresentasikan. Proses analisis dimulai dengan menelaah informasi data yang sudah diperoleh, baik data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari keseluruhan informasi atau data dirangkum dalam bentuk kategorisasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya kategori-kategori yang sudah diklasifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk sebuah deskriptif yang utuh, selanjutnya dianalisis sampai kemungkinan untuk diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Tinjauan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / Daerah Tingkat II. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49). Setelah dilakukan berbagai penelitian yang di lakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II pada tanggal 14 Juni 1965 Daerah ini terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 Km². Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 Km, dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km. Dengan kondisi ini maka Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai Potensi yang luas, terutama di bidang perikanan.

Sebagai daerah pasang surut, maka terdapat sungai cukup banyak dengan penyebaran sungai hampir seluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan, juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada pasang surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan "*Negeri Seribu Parit*".

Prospek pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi, karena berada dipantai timur Sumatera dan berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai "*Pintu Gerbang Pantai Timur Sumatera*" dalam berbagai aktifitas pembangunan.

4.2. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No.49). Secara Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah hutan payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit-bukit dengan ketinggian 5 Meter s/d 35 Meter dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Propinsi Riau pada posisi :

0°36' : Lintang Utara.

1°07' : Lintang selatan.

104°10' : Bujur Timur dan

102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menjelaskan tentang jarak tempuh untuk dapat menuju Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 4.1 Jarak Ibukota Kabupaten Kesetiap Ibukota Kabupaten yang ada di Propinsi Riau

ANTARA	JARAK LURUS (Km)
Pekanbaru-Tembilahan	213
Pekanbaru-Rengat	156
Pekanbaru-Bangkinang	50
Pekanbaru-Bengkalis	128
Pekanbaru-Tanjung Pinang	340

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

4.3. Fisiografi

Sebagian besar dari Luas wilayah atau 93,31% Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 Hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan speedboat maupun pompong dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di Daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Propinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami oleh penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk

menjadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi; Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti; Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang dan Selat/Terusan Tekulai.

Selain Selat/Terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain; Terusan Beringin, Terusan Mandah, Terusan Igal dan Mandah dan lain-lain. Disamping sungai dan selat/terusan di daerah ini terdapat pula parit-parit buatan yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh petani. Parit-parit buatan tersebut tetap dimanfaatkan sampai sekarang sebagai saluran drainase pengairan, serta untuk keperluan lalu lintas perhubungan.

Tabel 4.2 Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

ANTARA	JARAK LURUS (Km)
Tembilahan-Kota Baru	165
Tembilahan-Selensen	175
Tembilahan-Pulau Kijang	101
Tembilahan-Benteng	85
Tembilahan- Enok	88

Tembilahan-Kuala Enok	53
Tembilahan-Sapat	23
Tembilahan-Concong	18
Tembilahan-Tembilahan	0
Tembilahan-Tembilahan Hulu	1
Tembilahan-Sungai Salak	40
Tembilahan-Harapan Tani	15
Tembilahan-Sungai Piring	22
Tembilahan-Teluk Pinang	65
Tembilahan-Kuala Lahang	75
Tembilahan-Khairian Mandah	97
Tembilahan-Sungai Guntung	168
Tembilahan-Pelangiran	160
Tembilahan-Saka Rotan	165
Tembilahan-Pulau Burung	170

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

4.4. Kondisi Demografi

4.4.1. Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti Daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan

hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 332.824 jiwa. Kepadatan pendudukan di Kabupaten di Indragiri Hilir adalah 80 jiwa per km². kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 331 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan Tingkat Kepadatan 24 jiwa per km².

Tabel 4.3 Perbandingan Luas Wilayah dan Penyebaran Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (%)
Keritang	53,45	4,68	60,610	9,04
Kemuning	525,48	4,53	15,278	2,28
Reteh	407,75	3,51	48,054	7,16
Sungai Batang	145,99	1,26	13,665	2,04
Enok	880,86	7,59	37,259	5,55
Tanah Merah	721,56	6,22	35,679	5,32
Kuala Indragiri	511,63	4,41	21,550	5,21
Concong	160,29	1,38	13,620	2,03
Tembilahan	197,37	1,70	65,324	9,74

Tembilahan Hulu	180,62	1,56	36,985	5,51
Tempuling	691,19	5,96	28,144	4,20
Kempas	364,49	3,14	28,956	4,32
Batang Tuaka	1.050,25	9,05	25,140	3,75
Gaung Anak Serka	612,75	5,28	23,735	3,54
Gaung	1.021,74	8,80	43,359	6,46
Mandah	1.479,24	12,75	48,422	7,22
Kateman	561,09	4,83	47,288	7,05
Pelangiran	531,22	4,58	31,717	4,73
Teluk Belengkong	499,00	4,30	15,095	2,25
Pulau Burung	520,00	4,48	30,934	4,61
Jumlah	11.605,97	100	670.814	100

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

4.4.2. Sosial

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam meningkatkan pendidikan suatu daerah terutama daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri.

4.5 Mata Pencaharian Penduduk

Kebanyakan mata pencaharian daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan bertani, berkebun dan sebagai nelayan. Sebagian lahan pertanian (sawah) adalah lahan pasang surut, sedangkan lahan pertanian (bukan sawah) sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan tegal/kebun. Sedangkan lahan pertanian sebagian besar atau lebih dari setengahnya adalah hutan Negara. Untuk dapat melihat lebih lanjut dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 4.4 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Indragiri 2007-2008

NO	KOMODITI	2007	2008
1	BERAS	121.399,26	111.684,22
2	JAGUNG	11.880,31	7.632,89
3	KEDELAI	436,67	739,82
4	KACANG TANAH	14,58	6,73
5	KACANG HIJAU	84,42	96,37
6	UBI JALAR	734,70	738,46
7	UBI KAYU	3.257,48	2.279,17
8	SAYUR-SAYURAN	4.368,70	2.339,00
9	BUAH-BUAHAN	26.337,81	23.298,22

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir juga ada juga bekerja sebagai nelayan.dan juga sebagai bekerja sebagai penambak ikan dan juga udang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Sumber Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/Lahan Kelautan dan Perikanan Kabupaten INHIL Tahun 2008

Aspek Sumber Daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan (%)
1. Sumberdaya Penangkapan			
- Perairan laut (ton)	36.404,00	32.828,50	89,63
- Perairan umum (ton)	2.600,00	2.522,50	97
2. Budidaya Perikanan			
1. Budidaya air tawar			
- Kolam (Ha)	1.657,00	122,00	7,36
- Keramba (unit)	3.500,00	-	-
- Mina Tani (Ha)	17.000,00	116,00	0,96
2. Budidaya Air Payau (Ha)	31.600,00	1.399,00	4,43
(Tambak)			
3. Budidaya Laut (Unit)	20.000,00	-	-
(Kejapung)			
4. Budidaya Pantai (Ha)	2.500,00	-	-
(Kerang)			

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sumber daya perikanan yang cukup potensial dan perlu dkembangkan hingga menjadi suatu sumber pandapatan yang apat meningkatkan pendapatan dfaerah

4.6 Kondisi Perekonomian

Peranan atau kontribusi sektor perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam presentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sector ekonominya.

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah dari sini dapat dilihat sector-sektor yang berperan dalam perekonomian daerah.

Pada tahun 2008, PDRB Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku dapat kita lihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 50,93% kemudian sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan dan hotel masing-masing sebesar 22,97% dan 12,55%. Untuk dapat melihat kontribusi per sektor dapat dilihat pada table 4.4 dibawah ini:

Table 4.6 Distribusi persentase PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004-2008 (persen)

No	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan	46,88	48,61	50,21	49,49	50,93
2.	Pertambangan dan penggalian	0,47	0,44	0,42	0,39	0,38
3.	Industri pengolahan	26,21	24,97	23,50	24,36	22,97
4.	Listrik dan air bersih	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08
5.	Bangunan	3,63	3,24	2,97	2,93	2,79
6.	Perdagangan	11,49	12,20	12,00	12,41	12,55
7.	Pengangkutan dan komunikasi	2,22	1,99	1,85	1,78	1,72
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,69	1,58	1,56	1,59	1,53
9.	Jasa-jasa	7,29	6,86	7,40	6,96	7,04
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL/INHIL dalam angka 2009

Pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir baik dalam pembentukan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan segala bidang, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.

4.7. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

4.7.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Prinsip dari Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 22 Thn 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah pada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud dari penekanan prinsip inilah Pemerintah Daerah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas ini dengan kesempatan dan peluang yang ada untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan kedepan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah Pungutan Penghasilan Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kegiatan pembangunan di daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memandang adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Pada awal berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sendiri. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri di bawah pimpinan Bapak “H. Usman

Fu'ad". Setelah lebih kurang 40 tahun berjalannya Dinas Pendapatan Daerah, pada pertengahan bulan Juli 2005 berpindah ke Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan yaitu *Gedung Inhil business Center* yang dibangun mulai tahun 2003. Di *Gedung Inhil business Center* Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR-Gemilang), juga sebagai Kantor Pelayanan terpadu Badan Perizinan dan Promosi Daerah (BPMPD)

Adapun nama-nama Yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. H. Usman Fu'ad.
2. Yudha Yahya, BA
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jaelani Sabrah
5. Drs. Nazarudin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, SE.MP
10. Drs. H. A. Rasyid.HZ (Kadispenda sekarang)

4.7.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Aparat pelaksana Pemerintah Daerah dengan salah satu Tugas Pokoknya melaksanakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai unsur pelaksana pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah terlaksana terhadap sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun penggalan sumber-sumber baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendapatan Daerah, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas pendapatan Daerah mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas baik administrative maupun operasional sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas.
- 2) Sub Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Sekretariat dibantu beberapa urusan bagian yang terdiri dari bagian program, Umum dan Perlengkapan, Sub bagian Kepegawaian dan Keuangan.
- 3) Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan Penetapan, pemeriksaan data serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh dua seksi yaitu seksi pendataan dan penetapan, seksi Keberatan.

- 4) Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah lainya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan Pajak dan Retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi Pajak, Seksi Retribusi dan Pendapatan asli daerah Lainnya.
- 5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, perhitungan restitusi serta pelaporan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pembukuan dan verifikasi, seksi pelaporan dan restitusi.
- 6) Bidang Dana Perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yaitu seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Pajak. Seksi Dana Perimbangan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan Yang terdiri dari :
 - a) UPTD Tempuling
 - b) UPTD Tanah Merah (Wil. Kerja : Tanah Merah dan Enok)
 - c) UPTD Kuala Indragiri
 - d) UPTD GAS (Wil.kerja: Gas dan Batang Tuaka)
 - e) UPTD Gaung
 - f) UPTD Reteh
 - g) UPTD Kritang (Wil.kerja: Kritang dan Kemuning)

h) UPTD Mandah

i) UPTD Kateman (Wil. Kerja : Kateman, Pulau Burung, Teluk Balengkong dan Pelangeran)

j) UPTD Tembilahan

4.7.3. Gambaran Personil Dinas Pendapatan

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat struktur organisasi Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada lembaran lampiran laporan penelitian ini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah pegawai sebanyak 82 orang dengan golongan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah PNS pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7. Jumlah PNS pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
Dilihat Dari Golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	2
2	III	35
3	II	40
4	I	5
	Jumlah ...	82

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2009

Selanjutnya dapat juga dilihat tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan kewenangannya. Dimana pada saat ini Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pegawai untuk tingkat pendidikan S-2 sebanyak 2 (dua) orang, untuk pendidikan S-1 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, Pendidikan Sarjana muda 4 (empat) orang, SLTA 50 (lima puluh) orang, SLTP 3 (tiga) orang, SD 4 (empat) orang . Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8. Jumlah PNS pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
Dilihat Dari Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	2
2	Sarjana	21
3	Sarjan Muda	4
4	SLTA	50
5	SLTP	3
6	SD	4
	Jumlah ...	82

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2009

Disamping jumlah personil sebagaimana tersebut diatas, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang cukup

luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga yang ada pada di Dipenda Inhil, diketahui dari segi kualitas pegawai yang ada belum mendukung kearah SDM yang memadai. Karena memperkerjakan/ memperbantuan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 62 orang.

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja UPTD dengan tugas pokok "Sebagai Juru Pungut". Adapun gambaran penempatan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9. Jumlah Juru Pungut (UPTD) Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

NO	WILAYAH KERJA JURU PUNGUT	JUMLAH PERSONIL
1	UPTD Kecamatan Tempuling	3
2	UPTD Kecamatan Tanah Merah	2
3	UPTD Kecamatan Keritang	3
4	UPTD Kecamatan Reteh	3
5	UPTD Kecamatan Gaung Anak Serka	4
6	UPTD Kecamatan Gaung	3
7	UPTD Kecamatan Mandah	2
8	UPTD Kecamatan Kateman	5
9	UPTD Kecamatan Tembilahan	35

10	UPTD Kecamatan Kuindra	2
	JUMLAH	62

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2009

4.7.4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah ***” Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal”*** sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta Pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan penegakan Supermasi Hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

4.7.5. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dikemukakan. Maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran operasional, tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pemerintah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
4. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Belanja Pembangunan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah itu adalah :

1. Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Adanya data-data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat
5. Meningkatkan akuntabilitas publik
6. meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang terpenting bagi setiap daerah. Hal ini juga tertuang dalam UU No.33 Thn 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini akan berpengaruh juga kepada biaya pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga pemerintah daerah selalu mengupayakan pengelolaan dan penggalan secara maksimal.

Begitu pentingnya peranan PAD, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu melakukan upaya seoptimal mungkin agar sumber penerimaan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pembangunan. Dari komponen-komponen PAD yang ada, salah satu sumber yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Dikatakan demikian karena karena pajak daerah adalah penerimaan melalui pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan dapat dipaksakan. Kemudian dari segi objek pajak itu sendiri cenderung berkembang dengan cepat sehingga menimbulkan banyaknya subjek pajak yang dapat diambil melalui pungutan.

Pada tahun 2009, pengaruh pajak daerah terhadap PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri cukup tinggi yaitu 20,51%. Sehingga jelas, bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan khususnya Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

4.9 Jenis Potensi Pajak Daerah Di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak potensi pajak yang dapat digali potensinya. Adapun pajak daerah yang telah digali potensinya adalah terdiri dari:

1. Pajak hiburan
2. Pajak penerangan jalan
3. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
4. Pajak usaha penyewaan bangunan
5. Pajak pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan
6. Pajak hotel
7. Pajak reklame
8. Pajak restoran
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak pendaftaran perusahaan

Melihat potensi pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang cukup variatif ini memungkinkan Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan penerimaan dalam hal pajak daerah di daerah-daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, dalam satu kecamatan tidak

dapat diambil objek pajaknya secara keseluruhan. Dalam arti, tidak semua objek pajak ada dalam satu daerah. Dikarenakan luas daerah yang berbeda dan potensi pajak yang masing-masing daerah memiliki keunggulan objek pajak yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 4.10 Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
per-Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Potensi pajak daerah di setiap Kecamatan INHIL
1.	Keritang	543,45	- Pajak penerangan jalan - Pajak usaha penyewaan bangunan - Pajak pengambilan bahan galian golongan C
2.	Kemuning	525,48	- Pajak perangan jalan
3.	Reteh	407,75	- Pajak restoran - Pajak hotel - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan - Pajak usaha penyewaan bangunan
4.	Sungai Batang	145,99	- Pajak pengambilan hasil laut & budidaya perikanan - Pajak penerangan jalan.
5.	Enok	880,86	- Pajak sarang burung walet - Pajak restoran - Pajak usaha penyewaan bangunan
6.	Tanah Merah	721,56	- Pajak pendaftaran perusahaan - Pajak pengambilan hasil laut & budidaya perikanan.
7.	Kuindra	511,63	- Pajak penerangan jalan - Pajak sarang burung walet - Pajak pengambilan hasil laut & budi daya perikanan
8.	Concong	160,29	- Pajak sarang burung walet - Pajak pengambilan hasil laut & budi daya perikanan
9.	Tembilahan kota	197,37	- Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan - Pajak reklame - Pajak hiburan - Pajak penyewaan bangunan - Pajak restoran

10.	Tembilahan hulu	180,62	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak pengambilan hasil laut & budi daya perikanan - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan - Pajak reklame - Pajak hiburan - Pajak penyewaan bangunan - Pajak restoran - Pajak pengambilan hasil laut & budi daya perikanan
11.	Tempuling	691,19	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak bahan galian golongan C - Pajak pendaftaran perusahaan - Pajak penerangan jalan - Pajak restoran
12.	Kempas	364,49	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak pendaftaran perusahaan - Pajak bahan galian golongan C - Pajak penerangan jalan - Pajak restoran
13.	Batang Tuaka	1050,25	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan
14.	Gaung Anak Serka	612,75	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan
15.	Mandah	1479,24	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak pengambilan hasil laut & budidaya perikanan - Pajak reklame - Pajak penerangan jalan
16.	Gaung	1021,74	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan. - Pajak pengambilan hasil laut & budidaya perikanan
17.	Kateman	561,09	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan. - Pajak pengambilan hasil laut & budidaya perikanan - Pajak hotel - Pajak restoran - Pajak reklame
18.	Pelangiran	531,22	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan
19.	Teluk Belengkong	499,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan
20.	Pulau Burung	520,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sarang burung walet - Pajak penerangan jalan - Pajak reklame - Pajak hiburan

			<ul style="list-style-type: none"> - Pajak penyewaan bangunan - Pajak restoran - Pajak pengambilan hasil laut & budi daya perikanan.
--	--	--	---

Sumber : Data olahan Tahun 2010

Dari tabel diatas, dapat dilihat tentang potensi pajak yang ada di Kecamatan se- Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat dilihat bahwa luas daerah belum tentu dapat ataupun memiliki potensi pajak daerah yang dapat diambil secara maksimal. Daerah yang memiliki potensi pajak daerah yang paling dominan di Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan objek pajak yang sedikit dimiliki oleh kecamatan adalah Pajak Hiburan, Pajak Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Hotel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah mencoba menggali potensi di setiap kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan secara keseluruhan setiap daerah dapat diambil potensinya sebagai sumber penerimaan daerah yang mana penerimaan ini digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Sistem Penerimaan dan Pemungutan Pajak Daerah

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berada sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada daerah, untuk itu kepada Dinas Pendapatan Daerah dituntut agar melaksanakan tugasnya dalam penerimaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah melakukan usaha agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

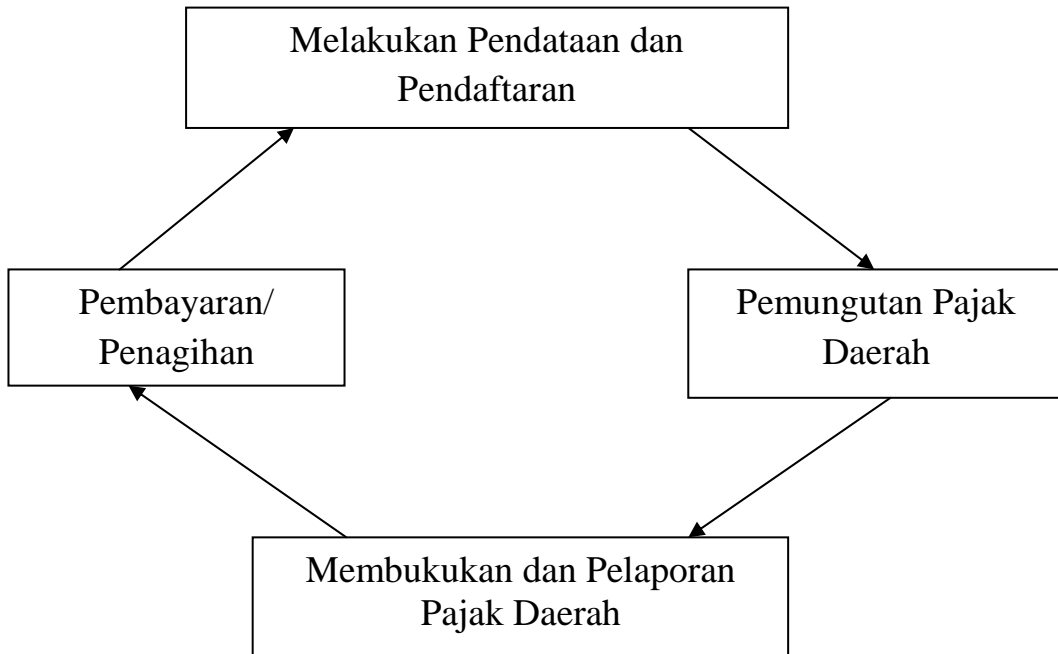
Pajak daerah adalah sumber pendapatan asli daerah di mana pajak daerah termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaannya dapat dijadikan sebagai dana pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

5.1.1. Sistem Penerimaan Pajak Daerah

Untuk mencapai tujuan dalam suatu kegiatan, organisasi diharuskan mempunyai sistem dalam pencapaian tujuan tersebut, begitu juga halnya dengan kegiatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat melakukan pengeolaan penerimaan pajak daerah secara sistematis.

Dalam melakukan proses penerimaan pajak daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, yaitu di mulai dari pendataan dan pendaftaran, pemungutan pajak daerah, membukuan pajak daerah, penyetoran pajak daerah dan terakhir pembayaran/penagihan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang akan dijelaskan pada setiap tahapannya.

Gambar 5.1 Proses Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah



Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

5.1.1.1. Pendataan dan Pendaftaran

Sebelum melakukan sistem penerimaan daerah Dinas Pendapatan daerah setiap tahun membuat tim pendataan ulang yang melibatkan seluruh staf pegawai Dinas Pendapatan yang kemudian dibagi dalam empat (4) petugas yaitu:

1. Petugas Pendataan Walet
2. Petugas Pendataan Pajak Hotel/Restoran
3. Petugas Pendataan Reklame
4. Petugas Pendataan Kios/Toko/Kedai/Non Perusahaan

Diantara empat (4) kelompok petugas yang ada, Petugas Pendataan Kios/Toko/Kedai/Non Perusahaan kemudian dibagi lagi dalam tujuh (7)

kelompok yang dibagi sesuai dengan jalan/daerah yang akan diambil pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hilir.

Setelah membagi tim menjadi beberapa petugas, maka Dinas Pendapatan Indragiri Hilir akan mendata yang dimulai dari objek pajak dan subjek pajak, dan penentuan pajak yang terutang yang ada dilapangan dengan membawa blanko (kartu data) yang berbeda-beda sesuai dengan objek pajak yang akan dikenakan oleh wajib pajak. Kemudian memberikan formulir pendaftaran kepada wajib pajak. Apabila telah diisi maka wajib pajak akan diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya di catat dalam Daftar Induk, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga setiap awal tahun pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah itu, berdasarkan SPTPD Dinas Pendapatan Indragiri Hilir akan menerbitkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah)

5.1.1.2. Pemungutan Pajak Daerah

yang kemudian SKPD tersebut diserahkan kepada Bidang Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Asli lainnya untuk melakukan pemungutan yang setelah itu mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam hal pemungutan, Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan salah satu Dinas dalam melakukan Pemungutan Pajak yang ada. Yaitu Pajak Penyewaan Bangunan yang melakukan pemungutan adalah Dinas Pertambangan, Industri dan Perdagangan (DISPERINDAG).

5.1.1.3. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

Kemudian setelah melakukan pemungutan terhadap objek pajak, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan pembukuan dengan menghimpun data dari hasil pemungutan berdasarkan objek pajak, subjek pajak, dan penentuan pajak yang terhutang, dan objek pajak yang telah tutup dengan klasifikasi nama daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang lalu dibuat dalam bentuk jurnal disertai buku pembantu wajib pajak dan kemudian melaporkan hasil pajak kepada Bendahara khusus Penerimaan (BKP) dalam bentuk buku besar sesuai masa pajak. Namun, peneliti melihat dalam hal proses pembukuan sendiri bentuk pelaporan yang sesuai adalah pada tahun 2008. Dikarenakan pada saat awal 2009 mendapatkan ISO TAHUN 2009, berarti secara otomatis Dinas Pendapatan telah melakukan standar yang dilakukan oleh ISO sendiri.

Dalam hal pengawasan, Dinas Pendapatan Daerah sebagai Tempat dalam mengumpulkan pendapatan daerah telah berusaha melakukan pengawasan seefisien mungkin. Dengan melakukan berusaha mencapai standar/program yang telah ditentukan. Yaitu;

1. Objek yang menjadi sasaran didalam penerimaan pajak
2. Jumlah wajib pajak (yang terdaftar)
3. Besarnya pajak yang dikenakan pada masing-masing jenis pajak
4. Petugas yang melakukan penerimaan pajak.

Menurut peneliti, standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan masih belum mencapai standar, seperti

contoh dalam Pajak Sarang Burung Walet, dalam hal pemungutan pajak daerah pada saat petugas yang bertugas dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet tidak menghadirkan ataupun bersama-sama dengan pengawas untuk melakukan pungutan terhadap objek pajak. Dari wajib pajak sendiri, sering tidak melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah apabila melakukan panen terhadap sarang burung walet. Dalam hal sanksi yang diberikan juga masih kurang, walaupun telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, tapi masih jarang dilakukan sanksi terhadap wajib pajak yang telah melakukan kecurangan.

5.1.1.4. Pembayaran/Penagihan

Dalam tahap ini sudah ditentukan dalam peraturan daerah (PERDA), pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, DAN STPD. Pembayaran pajak daerah harus lunas dan selanjutnya akan diberi tanda setor berupa Surat Tanda Setor (STS). Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran. Maka berakibat dikenakan sanksi administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Dalam melakukan penagihan dilakukan beberapa tahap yaitu:

1. Surat tegur atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak awal jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan wajib pajak belum melakukan pembayaran. Maka jumlah pembayaran yang dibayar akan ditagih dengan surat paksa. Surat paksa dapat diterbitkan bila sudah melewati 21 (dua

puluh satu) hari sejak surat teguran telah diterbitkan. Apabila surat paksa telah diterbitkan jangka waktu yang telah diberikan untuk dapat melunasi pajak adalah 2 x 24 jam.

3. selanjutnya, jangka waktu 2 x 24 jam tidak diperhatikan oleh wajib pajak. Maka dapat melakukan penyitaan. Setelah lewat 10 (sepuluh) hari surat pernyataan melakukan penyitaan, maka Dispenda dapat melakukan pengajuan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara. Apabila sudah ditetapkan hari, tanggal dan tempat pelelangan, juru sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Namun, peneliti melihat hal ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Dalam arti DISPENDA hanya melakukan surat teguran dan untuk tahap selanjutnya DISPENDA tidak melakukan surat paksa terlebih untuk melakukan penyitaan. Sehingga, banyak dari wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak darah dan menutup objek pajak tanpa pemberitahuan kepada DISPENDA.

5.1.2. Penetapan Tarif Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Indragiri Hilir , hingga saat ini masih menggunakan UU No.34 Thn 2000. Meskipun telah ada UU No.28 Thn 2009 sebagai pengganti undang-undang tersebut, namun belum bisa dilaksanakan sebagaimana semestinya, karena dari sumber yang diterima Peraturan Pemerintah yang menjadi petunjuk operasionalnya belum dimiliki.

Mengenai tarif pajak daerah, sebenarnya telah diatur menurut Undang-undang. Pengaturan tersebut sudah menetapkan batasan jumlah maksimal untuk

setiap pemungutan tarif pajak daerah. Tujuan pemerintah untuk mendapatkan tarif pajak maksimal ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang selalu membebani, sedangkan tarif pajak paling rendah tidak ditetapkan karena memberi peluang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya.

Di Kabupaten Indragiri Hilir besarnya tarif pajak daerah yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA), dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku, penetapan tarif tersebut telah melalui proses dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan adapun aspek penting yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif pajak yaitu kondisi perekonomian serta nilai manfaat. Untuk mengetahui tarif pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini dapat melihat tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Tarif Jenis-jenis Pajak Daerah Berdasarkan Perda di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Pajak Daerah	Peraturan Daerah (Perda)	Tarif Pajak yang Ditetapkan
1	Pajak Hiburan	No.03 Tahun 1998	Maksimal 35% (masing-masing jenisnya memiliki klasifikasi tertentu)
2	Pajak Penerangan Jalan	No.04 Tahun 1998	10%
3	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	No.05 Tahun 1998	20%

4	Pajak Usaha Penyewaan Bangunan	No.63 Tahun 2000	Bangunan rumah tempat tinggal yang di sewakan lebih dari 3 (tiga) buah rumah.
5	Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan	No.15 Tahun 2005	Maksimal 5% (masing-masing jenisnya memiliki klasifikasi tertentu
6	Pajak Hotel	No.06 Tahun 2008	10%
7	Pajak Reklame	No.07 Tahun 2008	25% (khusus untuk produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10%)
8	Pajak Restoran	No.08 Tahun 2008	10%
9	Pajak Sarang Burung Walet	No.09 Tahun 2008	10%
10	Pajak Pendaftaran Perusahaan	No.11 Tahun 2008	Maksimal Rp 1.000.000,- (masing-masing jenisnya memiliki klasifikasi tertentu).

Sumber: Perda (diolah) Tahun 2010

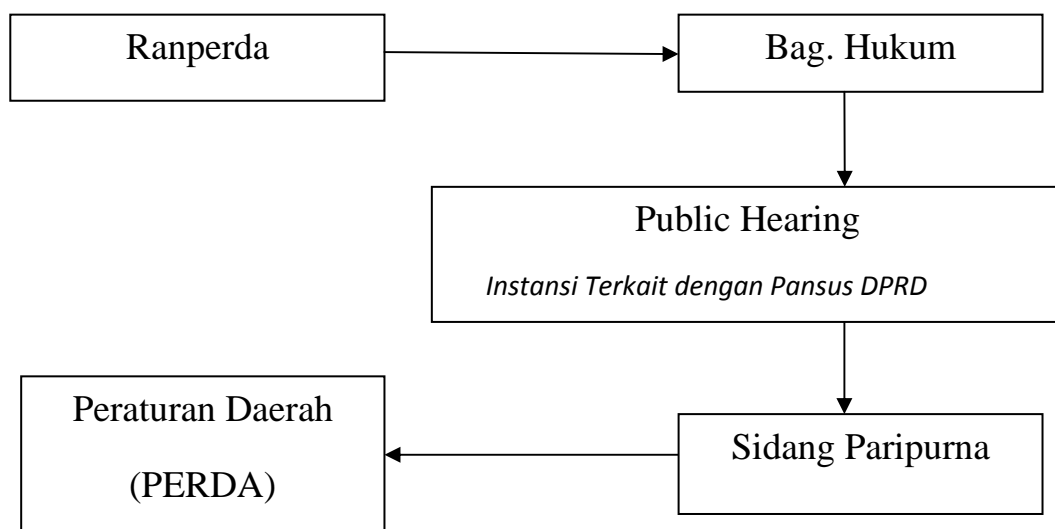
Memperhatikan tabel diatas, diketahui bahwa semua jenis pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir , tarifnya sudah ditetapkan melalui masing-masing Perda. Dapat dijelaskan untuk Pajak Hiburan bervariasi sesuai dengan tarif pajak maksimal adalah 35%. Ini berdasarkan kepada jenis hiburannya dan klasifikasinya. Adapun dasar pengenaannya dengan memperhatikan jumlah pembayaran yang harus dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Untuk Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dengan dasar pengenaan untuk Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik, untuk dasar

pengenaan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada Hotel dan Restoran. Kemudian untuk Pajak Sarang Burung Walet dasar pengenaannya adalah nilai jual sarang burung walet. Untuk Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Adapun dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C. Kemudian untuk Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan bervariasi sesuai dengan tarif pajak maksimal yaitu 5%. Adapun dasar pengenaannya adalah nilai jual dari dan atau hasil laut dan budidaya perikanan. Untuk Pajak Reklame berdasarkan perda, tarif maksimal sebesar 25%, tapi khusus untuk produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10%. Adapun dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Untuk pajak usaha penyewaan bangunan tidak dijelaskan lebih lanjut tentang tarif pajak usaha penyewaan bangunan, namun yang ada adalah dasar pengenaan yaitu Bangunan rumah tempat tinggal yang disewakan lebih dari 3 rumah buah rumah. Selanjutnya Pajak Pendaftaran Perusahaan besarnya tarif pajak maksimal adalah Rp.1.000.000,- dengan masing-masing memiliki klasifikasi tertentu.

Jika memberikan perbandingan besarnya tarif jenis- pajak daerah yang ditetapkan perda tersebut dengan tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 28 Thn 2009 dapat disimpulkan bahwa jenis pajak daerah seperti pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan pengambilan bahan galian golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Sarang Burung Walet menggunakan tarif pajak maksimal yang ditetapkan menurut UU

yang ada. Sedangkan Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan, Pajak Usaha Penyewaan Bangunan, dan Pajak Pendaftaran Perusahaan menggunakan tarif pajak yang cenderung kecil.

Mengenai besarnya jumlah tarif pajak daerah yang ditetapkan di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana diketahui semuanya prosesnya adalah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Namun sebelum perda tersebut ditetapkan, mekanismenya terlebih dahulu melalui proses seperti gambar 5.2 dibawah ini.



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dari gambar diatas dapat dijelaskan, proses awal di dalam penyusunan perda di Kabupaten Indragir Hilir terlebih dahulu rancangan Peraturan Daerah. Rancangan ini disusun oleh Instansi Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir). Lalu dilanjutkan dengan berkonsultasi kepada Bagian Hukum Kantor Bupati Indragiri Hilir. Setelah itu untuk memperoleh input demi penyempurnaan terhadap rancangan yang dibuat tersebut, maka diadakanlah dengar pendapat (Public Hearing) antara Pansus DPRD yang telah dibentuk, dengan instansi terkait. Dan kemudian barulah pada tahap terakhirnya diadakan

Sidang Paripurna Dewan dengan menghadirkan berbagai unsur untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda.

5.1.3. Sistem pemungutan pajak daerah

Didalam prosedur pemungutan pajak daerah, tahap inilah yang merupakan tahap terakhir dari proses pengelolaan pajak pajak daerah dan tahap yang sangat penting. Karena pemungutan disini adalah merupakan suatu rangkaian yang dimulai dengan penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak serta melakukan pengawasan penyetorannya.

Tata cara pemungutan Pajak Daerah yaitu;

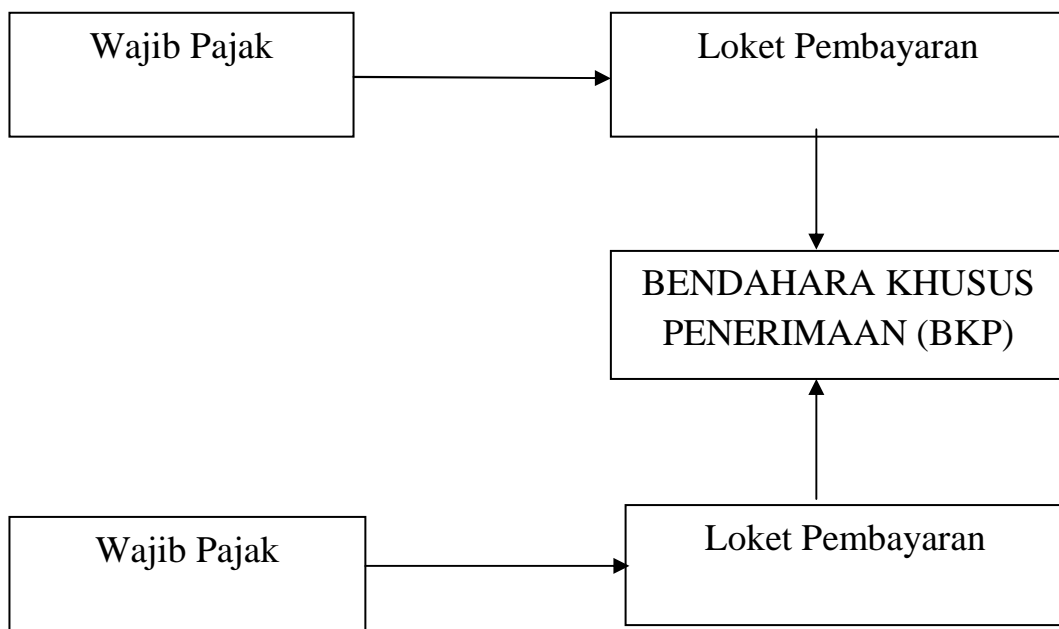
1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan dari DIPENDA atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak melalui SKPD, wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan SKPD.
2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak daerah dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Namun apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya maka DIPENDA dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

4. Terhadap wajib pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Kebetulan Pembetulan, Surat Kebetulan Keberatan, dan putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

5.1.4. Penyetoran dan pemungutan pajak daerah

Dalam hal pengelolaan penerimaan dilakukan dengan dua (2) cara. Cara *pertama* ialah wajib pajak langsung menyetor kewajibannya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) melalui loket pembayaran yang ada di pada Dipenda Indragiri Hilir. Kemudian cara *kedua* adalah wajib pajak menyetor kewajiban kepada petugas pemungut, dan selanjutnya petugas tersebut menyetornya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) melalui loket pembayaran. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 5.3 Skema pemungutan dan penyetoran pajak daerah
di Kabupaten Indragiri Hilir**



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Adanya penyetoran langsung oleh wajib pajak kepada Bendahara Khusus Penerimaan sebagaimana cara pertama, ini merupakan khusus bagi wajib pajak yang menggunakan system self assessment system. Dimana wajib pajak tersebut melakukan penghitungan dan penyetoran pajak secara sendiri. Sedangkan penyetoran pajak sebagaimana cara yang kedua, ialah dilakukan secara tidak langsung karena proses penyetorannya dilakukan oleh petugas pajak, yang terlebih dahulu melakukan pemungutan kepada wajib pajak. Ini berlaku kepada wajib pajak berdasarkan kepada wajib pajak yang menggunakan system Official Assesment System atau pembayaran pajak berdasarkan kepada jumlah pajak yang ditetapkan.

Melihat kepada cara pemungutan dan penyetoran pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, menurut analisa peneliti proses yang dilakukan tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan, terutama dikaitkan dengan penyetoran pajak yang menggunakan Official Assesment System. Seperti yang diketahui dalam Official Assesment System penyetoran pajak dilakukan oleh petugas setelah melakukan pemungutan langsung kepada wajib pajak. Adanya pemungutan pajak seperti ini, menurut asumsi peneliti hal ini sangat tergantung kepada kemampuan dan kejujuran dari petugas. Sebab apabila kedua hal tersebut tidak menjadi perhatian, tidak menutup kemungkinan bahwa lapangan dijumpai adanya perilaku wajib pajak yang sengaja menghindari kewajibannya atau petugas itu melakukan kerjasama dengan wajib pajak.

5.2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Undang-undang No.22 Thn 1999 tentang Otonomi Daerah pada prinsipnya memberikan peluang kepada daerah untuk tumbuh secara mandiri dan lebih terbuka dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kemampuannya sendiri sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan.

Dalam hukum pajak, hambatan-hambatan pajak disebut pajak dengan istilah perlawanan pajak, walaupun pajak tidak bisa sipungut tanpa adanya persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya. Namun demikian, rakyat tetap merasakan sebagai suatu beban, sehingga sebagian rakyat tetap tidak pernah sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal inilah yang dapat mempengaruhi usaha peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Sehingga dalam prakteknya menghambat pengelolaan penerimaan Pajak Daerah. Hambatan-hambatan yang terjadi ada dua (2) yaitu intern dan juga ekstern.

Hambatan *intern* adalah :

1. Petugas kurang memahami tentang prosedur pendataan tidak mencantumkan alamat subjek pajak, lokasi, sehingga menyulitkan dalam melakukan pemungutan.
2. Pada waktu pembayaran dilokasi loket, pegawai di lokasi loket yang sering menyamakan antara blanko SKPD dan SKRD.
3. Dalam lokasi loket, sering terjadi kekeliruan dalam hal pemberian Nomor Rekening. Sehingga di bidang pembukuan dan pelaporan untuk memilah

antara yang mana retribusi dan yang mana pajak daerah mengalami kesulitan.

4. Masih adanya tunggakan pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun baru bisa melakukan tunggakan sebelumnya. Sehingga untuk melakukan kegiatan pada awal tahun baru bisa dilakukan pada bulan April. Selain itu juga dana operasional yang bisa cair awal tahun baru bisa cair pada bulan april.
5. Salah satu tugas pembukuan adalah pelaporan. Keterlambatan yang terjadi dalam bidang pembukuan dalam melakukan pembukuan disebabkan keterlambatan dari Kas Daerah dalam melakukan laporan perdinas.

Sedangkan hambatan *ekstern* adalah

1. Hambatan yang berasal dari luar adalah Wajib pajak (WP) yang masih kurang kerjasama dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dengan munculnya perilaku menghindari pajak dan menyembunyikan pajak,
2. Wajib Pajak (WP) yang tidak memberi informasi kepada Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir perihal objek pajak yang dimiliki telah tutup ataupun Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan terhadap pajak yang akan dibayar.
3. Terjadinya pengelakan pajak dengan cara menyelundupkan pajak daerah dengan cara menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Seperti contoh Pajak Sarang Burung Walet yang wajib pajak sering menyembunyikan sebagian objek pajak. Sehingga, hanya sedikit yang dibayarkan oleh Pemerintah.

4. Banyaknya Objek Pajak yang dimiliki dalam satu Subjek Pajak sehingga menimbulkan banyaknya pemberian nomor rekening dalam penerimaan pajak daerah.

5.3. Kebijakan Dalam Peningkatan Pajak Daerah

Dengan melihat hambatan yang ada, Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tempat keuangan daerah melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir hambatan yang ada pada saat sekarang ini agar lebih efisien.

1. Perlu adanya peningkatan dalam hal pemberian pelatihan tentang pengelolaan penerimaan Pajak Daerah, menurut peneliti selama ini Dipenda melakukan sistem pembukuan khususnya berdasarkan pengalaman yang telah lalu. Karena tidak ada sistem pembukuan yang jelas tentang pembukuan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintahan Daerah. Sehingga Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir melakukan perbaikan dalam bidang pembukuan atas inisiatif sendiri.
2. Adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana dalam menghimpun data yang diterima sehingga memudahkan dalam hal menentukan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
3. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Daerah dengan melibatkan ahli hukum sehingga masyarakat dapat sadar betapa pentingnya pajak dalam meningkatkan pembangunan dan sanksi yang diterima bila tidak membayar pajak. Selama ini Dipenda juga melakukan sosialisasi melalui

televisi daerah, namun tidak dapat dijangkau secara keseluruhan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Membuat tim yustisi yang gunanya untuk memberikan bantuan hukum kepada wajib pajak yang keberatan terhadap keberatan pajak yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan hubungan secara persuasif kepada Wajib Pajak secara intensif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal, dikarenakan DISPENDA sendiri sebagai unsur pemerintahan yang mengurus tentang pendapatan daerah masih memiliki kekurangan. Dimulai dari bidang pendataan yang masih mencantumkan subjek pajak dan objek pajak yang banyak padahal sebenarnya subjek pajak memiliki objek pajak yang lebih dari satu.
- b. Dalam hal target penerimaan pajak daerah, diketahui penentuan target penerimaan pajak daerah belum berdasarkan kepada potensinya. Yang dilakukan adalah penentuan target penerimaan berdasarkan kepada realisasi penerimaan berdasarkan kepada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan menambahkan sekian persen.
- c. Dalam melakukan penerimaan, seringkali di lokasi loket sering menyamakan antara blanko penerimaan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sehingga ada kesulitan dalam melakukan pembukuan pajak daerah.

- d. Masih adanya tunggakan pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun baru bisa melakukan tunggakan sebelumnya. Sehingga untuk melakukan kegiatan pada awal tahun baru bisa dilakukan pada bulan April. Selain itu juga dana operasional yang bisa cair awal tahun baru bisa cair pada bulan april.
- e. Kurangnya pengawasan Dispenda dalam melakukan pendataan, penerimaan dan pembukuan pajak daerah sehingga sering terjadi kekeliruan ataupun kecurangan .
- f. Masalah dalam meningkat pendapatan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, Dispenda bukan hanya mengalami masalah di intern saja tapi juga masalah ekstern yaitu kurangnya kesadaran oleh wajib pajak betapa pentingnya wajib pajak dalam pembangunan suatu daerah, apalagi untuk daerah otonomi dimana daerah tersebut harus bisa mengurus rumah tangga mereka sendiri. Kemudian terdapatnya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga praktek manipulasi yaitu dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak tidak membayar sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya.

6.2 Saran-saran

- a. Dalam hal menghitung target berdasarkan penerimaan pajak daerah. Sebelumnya, akan sangat mempegaruhi kepada kinerja lembaga. Karena upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan bisa saja tidak maksimal dilakukan. Untuk itu, agar target yang ditetapkan itu lebih realistis maka sebaiknya dibuat berdasarkan kepada potensi.

- b. Melakukan pendataan ulang, yaitu bukan hanya mendata objek pajak saja tetapi juga subjek pajak dengan menghadirkan alamat subjek pajak(wajib pajak) ataupun alamat perwakilan terhadap objek pajak yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir serta objek pajak apa saja yang dimiliki oleh subjek pajak sehingga pegawai yang mendata tidak terlalu banyak memberikan nomor rekening terhadap subjek pajak.
- c. Memberikan denda dan sanksi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak, sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang dimiliki.
- d. Melakukan sosialisasi secara kontinu dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan hal pajak seperti ahli hukum untuk menjelaskan sanksi ataupun denda yang didapat bila melakukan pelanggaran.
- e. Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa malas ataupun enggan untuk membayar pajak.
- f. Perlu melakukan penggalian lebih lanjut tentang potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri. 2002. *Tesis: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kotamadya Pekanbaru*
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lengkap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Fokus Media.
- Ismail, Tjip. 2007. *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*. Yellow Printing.
- Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Universitas Indonesia, Volume XIV/
Januari/2006
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*. Balai Pustaka
- Setia, Tunggal. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Harvarindo.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, S.P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Perpajakan*. Andi Offset.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*, Sinar Grafika
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah*, Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia*. Visi Media.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia*. Visi Media.

Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2000 tentang *Pajak Usaha Penyewaan Bangunan*.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang *Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan*.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang *Pajak Sarang Burung Walet*.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Pajak Pendaftaran Perusahaan*

Waluyo. 2004. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat.

.....Undang-undang No. 28 Tahun 2009

.

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1. Target dan Realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Pajak Daerah	5
TABEL 4.1. Jarak Ibukota Kabupaten Kesetiap Ibukota Kabupaten Yang Ada di Propinsi Riau	33
TABEL 4.2. Jarak Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir	34
TABEL 4.3. Perbandingan Luas Wilayah Dan Penyebaran Penduduk Di Kabupaten Indragiri Hilir	36
TABEL 4.4. Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Indragiri 2007-2008	38
TABEL 4.5. Sumber Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/Lahan Kelautan Dan Perikatan Kabupaten INHIL Tahun 2008 ...	39
TABEL 4.6. Distribusi Prosentase PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004-2008	41
TABEL 4.7. Jumlah PNS Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat dari Golongan	46
TABEL 4.8. Jumlah PNS Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat Dari Tingkat Pendidikan	47
TABEL 4.9. Jumlah Juru Pungut (UPTD) Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir	48
TABEL 4.10. Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir per-Kecamatan	53
TABEL 5.1. Tarif Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Perda Di Kabupaten Indragiri Hilir	63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hilir	56
GAMBAR 5.1. Proses Pengelolaan Pajak Daerah.....	58
GAMBAR 5.2. Mekanisme Penetapan Peraturan Daerah	66
GAMBAR 5.3. Skema Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir.....	68